**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TUPOKSI DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA**

**Bahtiar Rifai Effendy1 , Salasiah2 , Suhardiman3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

***ABSTRACT***

Bahtiar Rifai Effendy. 2020. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda. Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Pembimbing: (1) Salasiah, S.Sos, M.Si dan (II) Suhardiman, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda, serta melihat terapan peran tersebut dalam setiap tahapannya mulai dari, tujuan, perencanaan, kegiatan, pesan, media, sampai dengan hasil. Sumber data diperoleh dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data yang digunakan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 diterapkan dengan beberapa program pengembangan prasarana pertanian, pelaksanaan penyuluh pertanian, serta beberapa faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan produksi pertanian. Implikasi penelitian ini diharapkan agar Dinas Pertanian Kota Samarinda dapat memaksimalkan program-program dibidang pertanian agar tujuan peningkatan produksi bidang pertanian dapat lebih maksimal.

**Kata Kunci**: Peran, produksi, pertanian, Dinas Pertanian.

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri guna memperluas lapangan kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan. Perkembangan kehidupan masyarakat pada dasarnya selalu mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Setiap orang dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengemban tugas tersebut sebagai suatu kewajiban (Sumber: Programa Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019).

Kota Samarinda. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda?

2) Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam meningkatkan produksi pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam proses penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan dari

penelitian ini antara lain:

1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda.

2) Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam meningkatkan produksi pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat disederhanakan secara praktis dan teoritis.

Jika menyangkut kebutuhan lembaga tertentu, manfaat tersebut dapat diajukan secara spesifik pada bagian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1) Secara subyektif, sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.

2) Secara teoritis, menambah khasanah ilmu administrasi negara bagi peneliti selanjutnya.

3) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas pertanian Kota Samarinda dalam meningkatkan produksi pertanian.

**BAB II**

**KERANGKA DASAR TEORI**

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) Webster dalam Wahab (2004:64) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, yang dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Dinas Pertanian Kota Samarinda, implemmentasi tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Dinas Pertanian Kota Samarinda.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Metode kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Sugiyono (2010:9) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengemukakan:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (Catherine Marshall, Gretchen B. Rosman, dalam Sugiyono, 2010:225). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan melakukan pencatatan atau pengkodean perilaku individu atau suasana, kondisi, dsb. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian, baik secara tertulis maupun secara lisan guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto yang memuat tentang produksi pertanian Kecamatan Palaran dan pelaksanaan penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penginderaan kepada objek penelitian yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016.

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya. Batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus penelitian, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain:

a. Pemerataan distribusi sarana dan prasarana pertanian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016, bahwa Dinas Pertanian Kota Samarinda mempunyai tugas pokok yaitu: “Melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan pertanian”.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pertanian Kota Samarinda ditunjang berda-sarkan struktur organisasi dengan rincian sebagai berikut: (1) Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, (4) Bidang Tanaman Pangan, (5) Bidang Hortikultura, (6) Bidang Perkebunan, (7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (8) Bidang Penyuluhan Pertanian, (9) Kelompok Jabatan Fungsional, dan (10) Unit Pelaksana Teknis.

**4.2 Hasil Penelitian**

4.2.1 Pemerataan distribusi sarana dan prasarana pertanian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

Sarana dan prasarana pertanian merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang utama guna mencapai terseleng-garanya proses pertanian. Dinas Pertanian memiliki fungsi menyediakan dukungan insfrastruktur, pengembangan potensi pertanian, irigasi pertanian, serta penyediaan alat dan dimensi pertanian, pemberian fasilitas pertanian, pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ir. H. Muhammad Syahril (2 April 2020, 13:20), kepala bidang sarana dan prasarana, bahwa:

*“Bidang sarana dan prasarana tugasnya adalah merumuskan kebijakan dalam pengelolaan alsin (alat mesin) pertanian, kami memberikan bantuan alsin pertanian kepada para petani yang memang membutuhkan, selain itu kami juga melakukaan pembinaan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana alsin pertanian itu sendiri”.*

Tugas bidang sarana dan prasarana pertanian ini pun dapat terealisasi dengan baik, dan dapat membantu masyarakat petani dalam proses pelaksanaan kegiatan pertanian, hal ini seperti yang dirasakan oleh Bapak Saiful hakim (53 tahun) ketua kelompok tani Pada Elo (7 April 2020, *15:25) yang mengatakan bahwa:*

*“Kami tentunya merasa sangat terbantu dengan sarana dan prasarana pertanian yang kami peroleh dari Dinas Pertanian sebagai penunjang kegiatan bertani kami, karena dari pekerjaan yang awalnya manual untuk panen, sekarang dengan adanya bantuan threser meskipun cara panennya manual, tetapi cara perontokannya kan pakai mesin, jadi lebih mempercepat”*

Dalam upaya percepatan kegiatan usaha serta peningkatan produksi pertanian, distribusi sarana dan prasarana pertanian diharapkan dapat tersebar secara adil dan merata, oleh karena itu penerima bantuan alat mesin pertanian didasarkan pada potensi pertanian yang ada di kelurahan tersebut. Terkait dengan hal itu, Ir. H. Muhammad Syahril (2 April 2020, 13:20) menjelaskan bahwa:

*“Kelompok tani yang kami berikan bantuan di tiap kecamatan kami klasifikasikan berdasarkan potensi pertanian dan jumlah kelompok tani yang aktif di kelurahan maupun desa tersebut. Di Kecamatan Palaran, dari data yang sudah ada, memang memiliki banyak kelompok tani, apalagi disana rata-rata warganya berprofesi sebagai petani karena memang potensi pertaniannnya yang sangat besar, oleh karena itu Dinas harus mendukung dengan pemberian bantuan sarana prasarana”.*

4.2.2 Pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

Terkait dengan upaya Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam peningkatan produktifitas pertanian sehingga membentuk sebuah Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Kemudian, Balai Penyuluhan Pertanian tersebut diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan pembagian wilayah kerjanya yaitu yang berkedudukan di dinas sebagai tenaga ahli dan yang berkedudukan di desa atau kelurahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Hj. Yuliana, M.Si (2 April 2020, 09:50) beliau menjelaskan dalam wawancara:

*“Balai Penyuluhan Pertanian dibentuk dibagi-bagi*

*lagi menjadi dua. Ada yang bertugas di dinas sebagai tenaga ahli dan ada yang ditempatkan di desa atau kelurahan sebagai penyuluh lapangan. Jadi mereka itu punya tugas masing-masing” (wawancara, 2 April 2020).*

Hal mendasar yang menjadi tugas dan manfaat adanya kelembagaan ini pun di ketahui oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani, seperti hasil wawancara dengan Bapak Sukamat (59 tahun) ketua kelompok tani Bina Bersama wilayah Kelurahan Simpang Pasir (7 April 2020, 16:55), bahwa:

*“Petani itu sebenarnya turun temurun, nah dengan pola yang sekarang ada pola yang namanya badan pertanian yang dikecamatan dan ada juga yang Dinas pertanian maka disitu petani harus kembali ke fitrahnya karena sudah ada fasilitas, jadi kalau petani yang sekarang sudah difasilitasi dan digerakkan oleh pemerintah tapi dia nggak bisa sukses dan nggak bisa berhasil berarti dia belum tau caranya dan nggak bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada”*

Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda merupakan suatu bentuk proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan proyek atau program dibidang pertanian yang telah direncanakan sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Hal tersebut merupakan salah satu aspek guna meningkatkan produksi pertanian di Kota Samarinda. Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Yuliana, M.Si selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dinas Pertanian Samarinda memang punya tugas dan kewajiban dalam hal ini kita wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pertanian, ya tujuannya agar kita tahu apa saja kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dinas sebelumnya. Kemudian hasil dari evaluasi ini kita jadikan acuan dalam penentuan program-program selanjutnya, salah satunya adalah program temu penyuluh dan pelaku utama (petani) guna memberikan pengetahuan tambahan bagi para petani”.*

**4.3 Pembahasan**

Pada pembahasan ini akan dibahas hasil penelitian yang didapat dari wawancara terhadap pihak Dinas Pertanian Kota Samarinda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah mengenai Peran Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Palaran. Penulis melakukan wawancara kepada key informan antara lain, dengan Ir. Hj. Yuliana, M.Si selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Ir. H. Muhammad Syahril selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Selain itu untuk mengetahui kebenaran informasi yang telah diberikan oleh informan, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa ketua/anggota kelompok tani yang tersebar di wilayah Kecamatan Palaran, antara lain: (1) Bapak Iwan (48 tahun) selaku anggota kelompok tani Tumperejo wilayah kelurahan Handil Bakti, (2) Bapak Hadi (52 tahun) selaku anggota kelompok tani Maspuden wilayah Kelurahan Bukuan, (3) Bapak Sukamat (59 tahun) selaku ketua kelompok tani Bina Bersama wilayah Kelurahan Simpang Pasir, (4) Bapak Saiful Hakim (37 tahun) selaku ketua kelompok tani Pada Elo wilayah Kelurahan Bantuas, (5) Bapak Sarim (43 tahun) selaku ketua kelompok tani Langgeng Lestari wilayah Kelurahan Rawa Makmur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengetahui bahwa pada dasarnya peran Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah cukup maksimal karena dalam pelaksanaan pencapaian program sudah terlaksana dengan tepat sasaran. Ini terbukti dari pelaksanaan program pengembangan prasarana pertanian, pelaksanaan penyuluh pertanian, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian. Dinas Pertanian Kota Samarinda telah menjalankan tugas dalam pengembangan prasarana dalam pertanian, seperti menyediakan pupuk, alat mesin, bimbingan oleh tim penyuluh pertanian. Dinas Pertanian Kota Samarinda juga telah membentuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dilakukan oleh dinas melalui penyuluh pertanian yang ada di dinas dan kelurahan.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala/penghambat yang dialami oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam melaksanakan program-program mereka, hal ini juga yang dialami oleh sebagian besar petani yang berharap agar bantuan pemerintah terkait usaha peningkatan produksi tanaman pangan di Kecamatan Palaran agar dapat lebih dimaksimalkan

**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan membahas kajian Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda, maka pada bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Implementasi Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Samarinda antara lain:

a. Dinas Pertanian Kota Samarinda telah menjalankan tugas dalam pengembangan prasarana dalam pertanian, seperti menyediakan pupuk, alat mesin, bimbingan oleh tim penyuluh pertanian untuk memaksimalkan hasil pertanian petani atau kelompok tani yang ada di Samarinda.

b. Dalam peningkatan produktifitas pertanian, Dinas Pertanian Kota Samarinda membentuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Kemudian, Balai Penyuluhan Pertanian tersebut diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan pembagian wilayah kerjanya yaitu yang berkedudukan di dinas sebagai tenaga ahli dan yang berkedudukan di desa atau kelurahan.

c. Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dilakukan oleh dinas melalui penyuluh pertanian yang ada di dinas dan kelurahan. Kemudian hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dari pihak penyuluh dilaporkan kepada dinas sebagai dasar dinas untuk penyempurnaan program-program dibidang pertanian yang akan datang.

2. Dalam pelaksanaan program-progam peningkatan produksi pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian juga menemukan faktor penghambat dan pendukung Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, antara lain:

a. Faktor penghambat

1) Keterbatasan dana yang dimiliki oleh dinas dalam pengadaan sarana dan prasaran pendukung pertanian seperti ALSINTAN (Alat Mesin Pertanian) Karena keterbatasan dana tersebut bantuan terhadap petani menjadi terhambat. Sehingga bantuan yang diberikan harus diprioritaskan, mana dulu yang harus diberikan kepada petani.

2) Kurang pengetahuan petani terhadap pengelolahan lahan pertanian karena petani masih menggunakan alat pertanian yang tradisional.

b. Faktor pendukung

1) Dalam peningkatan produksi pertanian Dinas Pertanian didukung oleh sarana prasarana yang memadai seperti ALSINTAN (Alat Mesin Pertanian) dan bantuan teknis seperti yang telah didistribusikan sebelumnya.

2) Penyuluhan yang dilakukan, serta kegiatan temu penyuluh dan pelaku utama oleh PPL dalam meningkatkan pengetahuan petani dalam pengolahan lahan pertanian dengan baik sangat menunjang

dalam peningkatan produksi pertanian.

5.2 Saran

Diharapkan Dinas Pertanian kota Samarinda dapat lebih meningkatkan kebutuhan petani sesuai dengan kebutuhan para kelompok tani tersebut dan Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dapat memberikan penyuluhan kepada petani sesuai dengan jadwal yang telah disusun agar pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan agar Dinas Pertanian Kota Samarinda dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk distribusi sarana dan prasarana pertanian dibanding tahun-tahun sebelumnya agar peningkatan produksi dapat tercapai dengan maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Daniel, Mohar, 2004. Pengantar Ekonomi Pertanian, PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Michael P. Torado, Stephen C. Smith, 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.

Nazir, Moh, 2011. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.

Nuhfil,Hanani, 2003. Strategi Pembangunan Pertanian, Lappera, Yogyakarta.

Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, 2008. Pengantar, Teori dan Kasus Ekonomika Pertanian, Swadaya, Jakarta.

Siahaan, N.H.T, 2014. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekartawi, 2002. Faktor Produksi Dalam Menghasilkan Barang Dan Jasa Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Sumarni, Murti, 2003. Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan, Edisi ke Lima, Liberty, Yogyakarta.

Yustika, Ahmad, Erani, 2002. Pembangunan Dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Hadisapoetro, Soedarsono, 2018. Pembangunan Pertanian.

http://scholar.unand.ac.id/39445/2/bab%201.pdf. (diakses 5 januari 2020).

Sudalmi, Endang, Sri, 2012. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/innofarm/article/download/28/2 (diakses 5 januari 2020).

dinaspertaniansamarindakota.com/ (diakses 10 desember 2019)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim Terus Tekan Kehilangan Produksi Pangan. https://kaltimprov.go.id/berita/dinas-pertanian-tanaman-pangan-kaltim-terus-tekan-kehilangan-produksi-pangan (diakses 5 januari 2020).

Prokal.Co, 2018 .Kaltim Kekurangan Penyuluh Pertanian. https://m.kaltim.prokal.co/read/news/358125-kaltim-kekurangan-penyuluh-pertanian-ini-kata-gubernur.html (diakses 5 januari 2020).

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\_pertanian (diaskses 7 januari 2020).

Programa Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019.